

## DAFTAR PUSTAKA

- A. *Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit X*, n.d.
- A.S, M. *Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit X*, n.d.
- Agustina, Rosa, Suharnoko, Hans Nieuwenhuis, and Jaap Hijma. *Hukum Perikatan: Law of Obligations. Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. 1st ed. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Alfarissa, Tiara, and Syalaisha Amani Puspitasari. “Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak.” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 79–87.
- Anggono, J.B, Gemma Galgani, Putu Aprita Rahayu, and Leo Susilo. *Buletin Edisi Khusus HUT RS X Ke-40*. Palembang, 2012.
- Aswari, Naro. *Kabid Pelayanan Dan Pencatatan Sipil*. Palembang, 2023.
- Dahlan, Sofwan, and Setyo Trisnadi. *Bioetika Dari Filsafah Kedokteran Sampai Ke Moral Dan Etika*. 1st ed. Semarang: Fakultas Kedokteran Unissula, 2018.
- Detikcom, Tim. “Akhir Gugatan Rp.23M Wamendagri Ke RSPI Soal Status Anak.” *Detik News*. Last modified 2023. Accessed June 5, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6756855/akhir-gugatan-rp-23-m-wamendagri-ke-rspi-soal-status-anak>.
- Eri Sefira, Martha. *Hukum Perdata*. Edited by Sofyan Hadi Nata. 1st ed. Ponorogo: CV.Nata Karya, 2017.
- F, E. *Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit X*, n.d.
- Farhana, Karla. “Agar Dapat Dijual, Rumah Sakit Ini Bujuk Para Ibu Lahirkan Bayi.” *Fimela.Com*. Last modified 2016. Accessed November 3, 2022. <https://www.fimela.com/lifestyle/read/2487224/agar-dapat-dijual-rumah-sakit-ini-bujuk-para-ibu-lahirkan-bayi>.
- Fauzy, Naufal. “Kronologi Lengkap Pengungkapan Kasus Jual Bayi ‘Ayah Sejuta Anak’ Di Bogor, Berawal Dari Puskesmas.” *Tribunnewsbogor.Com*. Last modified 2022. Accessed February 3, 2023. <https://bogor.tribunnews.com/2022/09/30/kronologi-lengkap-pengungkapan-kasus-jual-bayi-ayah-sejuta-anak-di-bogor-berawal-dari-puskesmas>.

- Fra, Ina. “Gugatan Wamendagri Lawan Dirut RSPI Masuk Tahap Mediasi.” *CNN Indonesia*. Last modified 2023. Accessed May 24, 2023.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230515130005-12-949688/gugatan-wamendagri-lawan-dirut-rspi-masuk-tahap-mediasi>.
- Gabriele. “Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Departemen Marketing Dan HRD PT Cahaya Indo Persada.” *Agora* 6, no. 1 (2018).
- Handoko, Lionisia Merdekawati. “Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Operasional Toko Di Supermarket UFO (United Fashion Outlet ) Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* 1, no. 2 (2013): 2–6.
- Harefa, Safaruddin. “Aspek Hukum Pidana Dalam Kesehatan (Criminal Malpraktik).” In *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, edited by Elan Jaelani, 133–148. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Kurniasari, Lia. “Hak Dasar Manusia.” In *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, edited by Elan Jaelani, 95–108. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Lamintang, P.A.F, and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. *UUD Negara RI Tahun 1945*, 2000.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.
- Mertha, I Ketut, I Gusti Ketut Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, I GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, and I Made Sugi Hartono. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. 6th ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.

- Nashriana. *Lektor Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Sriwijaya*. Palembang, 2023.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. *Dosen UNIKA Soegijapranata*. Semarang, 2023.
- Palembang, Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Palembang (Jiwa), 2019-2021.” Last modified 2021. Accessed January 21, 2023.  
<https://palembangkota.bps.go.id/indicator/12/167/1/jumlah-penduduk-palembang.html>.
- Palembang, Kota. “Peta Batas Administrasi Kota Palembang.” *Sekretariat JIGD Kota Palembang*. Last modified 2020. Accessed March 23, 2023.  
<https://bappedalitbang.palembang.go.id/peta-batas-administrasi-kota-palembang.html>.
- POGI. *Panduan Profesi Spesialis Obstetri-Ginekologi Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia*. Indonesia: Dewan Pembina POGI, 2018.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- RI. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*, 1990.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.
- . *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis*, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245544/permenkes-no-24-tahun-2022>.
- . *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132829/permen-pan-rb-no-35-tahun-2012>.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Indonesia, 2007.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4776>.
- . *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, 2018.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018>.
- . *Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, 2012.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- . *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Indonesia, 2006.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>.
- . *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2006. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40178/uu-no-13-tahun-2006>.
- . *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Indonesia, 2007.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.
- . *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.
- . *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- . *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. Indonesia, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38789/uu-no-44-tahun-2009>.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2022.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>.
- . “Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan” (2011).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.
- . *Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*,

1999. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- . *Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>.
- S, C. “Kepala Ruang Bangsal Persalinan,” 2023.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak*. 3rd ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Sari, Reny Yulita, Erni Suprapti, and Achmad Solechan. “Pengaruh Sosialisasi SOP APD Dengan Perilaku Perawat Dalam Penggunaan APD (Handsocon, Masker, Gown) Di RSUD Dr. H. Soewondo.” *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan (JIKK)* (2014): 1–10.
- Setiawan, Hari Harjanto. “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak.” *Sosio Informa* 3, no. 01 (2017): 26–39.
- Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan. “Petunjuk Pengisian Formulir Pelaporan.” Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, n.d.
- . “Standar Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI.” Palembang: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, 2022.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.
- Smith, Rhona K.M, Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edited by Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi. 1st ed. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Buku 1 Fungsi Dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2013.
- Subekti. *Pokok - Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa, 2008.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015.
- Sumariyanto, Totok, Trihoni Nalesti Dewi, and Tjahjono Kuntjoro. “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Terkait Dengan

- Peredaran Vaksin Palsu Di Kabupaten Semarang.” *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 4, no. 1 (2018): 46–72. <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk>.
- Surjanti. “Akibat Hukum Dan Sanksi Pidana Pengangkatan Anak Secara Illegal.” *Yustitiabelen* 1, no. 1 (2015): 65–81. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/419086>.
- Syaputra, Hariadi. “Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing (Studi Penetapan PN Nomor 1028/Pdt.P/2007/PN.Sby Dan Penetapan PN Nomor 62/Pdt.P/2010/PN.Mkd).” *Tesis*. Universitas Sumatera Utara, 2017.
- T, Y. *Direktur Rumah Sakit X*. Palembang, 2023.
- Taufiq, Abd. Rohman. “Penerapan Standar Operasional Prosedur Dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit.” *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Akuntansi dan Perpajakan* 12, no. 1 (2019): 56–66.
- X, Rumah Sakit. “Peraturan Perusahaan Rumah Sakit X Tahun 2021-2022.Pdf.” Palembang, 2021.
- Yulia. *BUKU AJAR HUKUM PERDATA*. 1st ed. Lhokseumawe: CV.BieNa Edukasi, 2015.
- Yusticia, Tim Beranda. *Kamus Istilah Hukum Superlengkap*. 1st ed. Yogyakarta: C-Klik Media, 2018.
- Yustina, Endang Wahyati. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. 1st ed. Bandung: CV Keni Media, 2012.
- . “Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan.” In *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, edited by Elan Jaelani, 111–131. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed August 17, 2022. [kbbi.lektur.id](http://kbbi.lektur.id).
- “Lembar Penilaian Kinerja Dokter,” n.d.
- “Perjanjian Kerjasama Dokter Mitra,” n.d.
- “Survey Awal,” n.d.

## LAMPIRAN 1 : Daftar Pertanyaan

### A. Rumah Sakit X

#### 1. Direktur Rumah Sakit

- a. Apakah ada peraturan/kebijakan/standar/SOP secara tertulis pengaturan pembuatan SKL di Rumah Sakit X ?
- b. Bagaimana tahapan pembuatan SKL di Rumah Sakit X ?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembuatan SKL di Rumah Sakit X ?
- d. Bagaimana cara Rumah Sakit X memperoleh data yang dibutuhkan untuk pembuatan sebuah SKL? Apa saja kendala yang dihadapi ?
- e. Bagaimana proses verifikasi data di dalam SKL? Apa saja kendala yang dihadapi ?
- f. Bagaimana Rumah Sakit mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan dalam pembuatan SKL yang berakibat adanya ketidakbenaran data dalam SKL?
- g. Bagaimana tanggapan pimpinan rumah sakit mengenai kasus adopsi ilegal ataupun penjualan bayi yang langsung mengubah identitas sang ibu dan sang ayah saat pembuatan SKL yang terjadi di Rumah Sakit X ?
- h. Bagaimana tindakan pimpinan rumah sakit terhadap semua pihak yang mengakibatkan ketidakbenaran data yang tercantum di dalam SKL?
- i. Apa pendapat anda bila di dalam surat keterangan lahir juga dicantumkan tanda tangan dari ayah/ keluarga dekat dari anak yang dilahirkan ?
- j. Apakah pimpinan rumah sakit mengetahui bahwa pembuatan SKL dapat mengakibatkan pertanggung jawaban baik secara administratif maupun pidana?
- k. Apakah pernah terjadi kasus pembuatan SKL yang tidak benar? Bagaimana upaya pembenahan yang dilakukan rumah sakit untuk mencegah atau mengendalikan kemungkinan terjadinya pembuatan SKL yang tidak benar dan mengakibatkan pelanggaran hak identitas bayi?

## 2. Dokter Spesialis Kandungan

- a. Apakah dokter mengetahui di Rumah Sakit X memiliki peraturan/kebijakan/standar/SOP secara tertulis pengaturan pembuatan SKL?
- b. Apakah dokter mengetahui bahwa pembuatan SKL merupakan bentuk perwujudan hak atas identitas bayi yang dilahirkan?
- c. Apakah sebelum menandatangani SKL, dokter melakukan verifikasi data terlebih dahulu atas kebenaran data yang termuat dalam SKL? Jika tidak pernah melakukan verifikasi sebutkan alasannya dan jika selalu melakukan verifikasi sebutkan juga alasannya.
- d. Apakah dokter pernah menghadapi perkara yang terkait SKL atau perkara identitas anak akibat ketidakbenaran SKL yang ditandatangani dokter?
- e. Jika pernah, apa tanggapan dokter dalam penanganan perkara tersebut dan upaya apa yang telah dilakukan dokter?
- f. Bagaimana tanggapan dokter mengenai kasus adopsi ilegal ataupun penjualan bayi yang langsung mengubah identitas sang ibu dan sang ayah saat pembuatan SKL ?
- g. Apa pendapat dokter bila di dalam surat keterangan lahir juga dicantumkan tanda tangan dari ayah/ keluarga dekat dari anak yang dilahirkan ?
- h. Apakah dokter mengetahui bahwa pembuatan SKL dapat mengakibatkan pertanggung jawaban baik secara administratif maupun pidana?
- i. Apakah dokter pernah menghadapi kasus pembuatan SKL yang tidak benar? Bagaimana upaya pembenahan yang dilakukan dokter untuk mencegah atau mengendalikan kemungkinan terjadinya pembuatan SKL yang tidak benar dan mengakibatkan pelanggaran hak identitas bayi?
- j. Menurut dokter bagaimana upaya pembenahan yang dilakukan rumah sakit untuk mencegah atau mengendalikan kemungkinan terjadinya pembuatan SKL yang tidak benar dan mengakibatkan pelanggaran hak identitas bayi?



### 3. Kepala Ruang Persalinan

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui di Rumah Sakit X memiliki peraturan/kebijakan/standar/SOP secara tertulis pengaturan pembuatan SKL?
- b. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pembuatan SKL merupakan bentuk perwujudan hak atas identitas bayi yang dilahirkan?
- c. Apakah sebelum menandatangani SKL, bapak/ibu melakukan verifikasi data terlebih dahulu atas kebenaran data yang termuat dalam SKL? Jika tidak pernah melakukan verifikasi sebutkan alasannya dan jika selalu melakukan verifikasi sebutkan juga alasannya.
- d. Apakah pernah menghadapi perkara yang terkait SKL atau perkara identitas anak akibat ketidakbenaran SKL yang ditandatangani dokter?
- e. Jika pernah, apa tanggapan bapak/ibu dalam penanganan perkara tersebut dan upaya apa yang telah dilakukan bapak/ibu?
- f. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kasus adopsi ilegal ataupun penjualan bayi yang langsung mengubah identitas sang ibu dan sang ayah saat pembuatan SKL ?
- g. Apa pendapat bapak/ibu bila di dalam surat keterangan lahir juga dicantumkan tanda tangan dari ayah/ keluarga dekat dari anak yang dilahirkan ?
- h. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pembuatan SKL dapat mengakibatkan pertanggung jawaban baik secara administratif maupun pidana?
- i. Apakah bapak/ibu pernah menghadapi kasus pembuatan SKL yang tidak benar? Bagaimana upaya pembenahan yang dilakukan rumah sakit untuk mencegah atau mengendalikan kemungkinan terjadinya pembuatan SKL yang tidak benar dan mengakibatkan pelanggaran hak identitas bayi?

## **B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Apakah dasar hukum penerbitan Akta Kelahiran yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Dinas?
2. Apakah ada kebijakan/standar/SOP dalam penerbitan Akta Kelahiran bayi yang diterbitkan Dinas?
3. Apa fungsi Surat Keterangan Lahir (SKL) yang diterbitkan rumah sakit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil?
4. Apakah sebelum menerima SKL sebagai syarat permohonan penerbitan Akta Kelahiran, bapak/ibu melakukan verifikasi data terlebih dahulu atas kebenaran data yang termuat dalam SKL? Jika tidak pernah melakukan verifikasi sebutkan alasannya dan jika selalu melakukan verifikasi sebutkan juga alasannya.
5. Bagaimana jika ternyata data di dalam SKL tidak benar dan Akta Kelahiran terlanjur diterbitkan, apa langkah pengendalian yang dilakukan Dinas?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pembuatan SKL dapat mengakibatkan pertanggung jawaban baik secara administratif maupun pidana?
7. Bagaimana jika ternyata data di dalam SKL tidak benar dan Akta Kelahiran terlanjur diterbitkan dan terjadi perkara hukum apa langkah pengendalian yang dilakukan Dinas?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai kasus adopsi ilegal ataupun penjualan bayi yang langsung mengubah identitas sang ibu dan sang ayah sehingga penerbitan Akta Kelahiran menjadi cacat yuridis?
9. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perlindungan terhadap hak identitas anak ?

## **C. Akademisi (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)**

1. Bagaimana hukum mengatur perlindungan hak identitas anak?
2. Menurut Bapak/Ibu apa hakekat fungsi Akta Kelahiran? Apakah penting dokumen Akte Kelahiran dalam perspektif hukum?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah SKL yang diterbitkan rumah sakit sangat penting dalam perspektif hukum sebagai langkah awal penerbitan dokumen identitas bayi?
4. Apa pendapat bapak/Ibu bila di dalam SKL juga dicantumkan tanda tangan dari ayah/ keluarga dekat dari anak yang dilahirkan ?
5. Bagaimana pertanggungjawaban pidana jika terjadi pelanggaran atas hak identitas anak akibat adanya ketidakbenaran atas dokumen yang diterbitkan, yaitu SKL yang diterbitkan rumah sakit dan Akte Kelahiran Anak yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?
6. Siapa saja yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum jika terjadi perkara atas terbitnya dokumen Akte Kelahiran Anak dan SKL yang tidak benar sehingga mengakibatkan pelanggaran hak identitas anak?
7. Jenis-jenis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dikenakan dalam perkara pidana atas ketidakbenaran data kelahiran anak sehingga diterbitkan SKL dan Akte Kelahiran yang isinya juga tidak benar?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kasus adopsi ilegal yang dikaitkan dengan ketidakbenaran data di dalam SKL dan Akte Kelahiran?  
Siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut?  
Pertanggungjawaban apa saja yang dapat dikenakan kepada semua pihak?  
Pemerintah daerah, rumah sakit, dokter dan tenaga administrasi yang berkaitan dalam penerbitan SKL dan Akta Kelahiran?
9. Bila pihak yang terlibat adalah staf Rumah Sakit (baik berupa kelalaian maupun kesengajaan), apakah *Vicarius Liability* Rumah Sakit dapat diterapkan?
10. Bagaimana usulan bapak/Ibu untuk mencegah terjadinya kekeliruan terutama ketidakbenaran data dalam penerbitan SKL sehingga mengakibatkan data dalam Akta Kelahiran juga menjadi tidak benar?  
Apakah ada usulan untuk rumah sakit, dokter dan Pemerintah Daerah Kota Palembang terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?